

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM  
PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh**

**SALSABILA SUKAMTO**

**NPM 2416041112**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh**

**SALSABILA SUKAMTO**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan bagi masyarakat, khususnya dari keluarga prasejahtera, dalam mengakses pendidikan yang layak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bagian dari kebijakan pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program KIP di Kabupaten Lampung Tengah, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIP di Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar berjalan sesuai pedoman, tetapi masih ada masalah teknis seperti waktu yang lama untuk memberikan bantuan, kurangnya sosialisasi, dan masalah dengan verifikasi data penerima. Faktor-faktor yang mendukung adalah dukungan dari pemerintah daerah dan keterlibatan sekolah dalam pengelolaan distribusi informasi kepada siswa. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya akses teknologi, ketidaktepatan tujuan, dan kendala administratif. Secara keseluruhan, program KIP telah membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan akses ke pendidikan, tetapi kinerjanya masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan prosedur implementasi.

Kata Kunci: Kartu Indonesia Pintar, Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Lampung Tengah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Pendidikan adalah komponen penting dalam pembangunan suatu negara karena memungkinkan negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan katalisator pembangunan. Setiap warga negara berhak atas pendidikan, menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan adalah hak dasar bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup di lapisan ekonomi menengah ke bawah, seperti yang dijamin oleh jaminan konstitusional ini.

Dalam konteks global, daya saing suatu negara ditentukan oleh pendidikan, yang dianggap sebagai investasi jangka panjang. Organisasi internasional seperti UNESCO dan UNICEF telah menekankan bahwa pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas adalah pilar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Mereka terutama menekankan tujuan ke-4, pendidikan berkualitas. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut dengan menerapkan kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan.

Namun, dalam kenyataannya, akses pendidikan masih menghadapi banyak tantangan, terutama bagi masyarakat miskin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat putus sekolah yang cukup tinggi di tingkat pendidikan dasar dan menengah masih cukup tinggi. Keterbatasan ekonomi keluarga adalah salah satu faktor penyebabnya. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering kali harus memilih antara pergi ke sekolah atau membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Situasi ini menunjukkan bahwa ada ketidakmerataan dalam akses pendidikan, yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini secara resmi dimulai pada tahun 2015 sebagai salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa melalui KIP, yang memungkinkan mereka terus sekolah tanpa mengalami kesulitan keuangan.

KIP adalah kebijakan publik yang lebih dari sekadar bantuan keuangan; itu bertujuan untuk meningkatkan akses, mengurangi putus sekolah, dan meningkatkan partisipasi siswa. Untuk menerapkan KIP dalam kerangka kebijakan publik, koordinasi lintas sektor diperlukan, termasuk Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan daerah, sekolah, dan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, seberapa efektif kebijakan ini diimplementasikan di tingkat daerah sangat dipengaruhi.

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu wilayah yang menarik untuk dipelajari. Kabupaten ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam dan merupakan salah satu daerah dengan populasi terbesar di Provinsi Lampung. Sebagian masyarakat di Lampung Tengah masih menghadapi masalah keuangan yang menghambat mereka untuk mendidik anak. Selain itu, ada perbedaan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akibatnya, penelitian tentang pelaksanaan KIP di Lampung Tengah sangat penting karena akan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat.

Selain alasan ekonomi, masalah terkait pelaksanaan KIP di Lampung Tengah juga dipengaruhi oleh alasan administratif dan teknis. Misalnya, pendataan calon penerima masih menjadi masalah, distribusi kartu kadang-kadang tertunda, dan pemanfaatan dana bantuan yang tidak selalu sesuai dengan tujuan utama kebijakan. Empat faktor utama, menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, memengaruhi keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kesulitan jika salah satu variabel tidak bekerja dengan baik.

Aspek sosialisasi kebijakan adalah masalah tambahan yang muncul. Tidak semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memahami dengan baik prosedur dan keuntungan KIP. Akibatnya, ada anak-anak dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sementara anak-anak dari keluarga miskin justru terlewatkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dengan akuntabilitas dan transparansi implementasi kebijakan.

Penelitian tentang pelaksanaan KIP di Lampung Tengah sangat penting dari sudut pandang akademik. Pertama, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif kebijakan KIP dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Kedua, secara teoretis, penelitian ini dapat menguji teori implementasi kebijakan dalam konteks daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya studi ilmu administrasi negara. Oleh karena itu,

penelitian ini tidak hanya membantu perkembangan empiris tetapi juga pengembangan ilmu pengetahuan.

Kajian KIP sebelumnya lebih banyak dilakukan di kota-kota besar atau di tingkat nasional, jadi penelitian di Lampung Tengah masih jarang. Meskipun demikian, mempelajari cara implementasi kebijakan di wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi unik akan memberikan pandangan baru tentang komponen yang memengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan melengkapi kekurangan kajian yang masih terbatas ini.

Sangat penting untuk menegaskan bahwa penerapan kebijakan tidak hanya masalah administratif, tetapi juga terkait dengan etika pelayanan publik dan keadilan sosial. Dalam administrasi negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang pelaksanaan KIP di Lampung Tengah sangat penting sebagai bagian dari penilaian kinerja birokrasi publik dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan.

#### A. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bagian dari agenda nasional yang dimaksudkan untuk mendukung visi “Indonesia Pintar” sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Melalui PIP, pemerintah berusaha mengatasi hambatan ekonomi yang sering kali menjadi alasan utama anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa melanjutkan sekolah.

Bantuan KIP diberikan secara langsung dan tidak tunai dan dikirim melalui rekening bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Peserta didik KIP menerima jumlah bantuan yang berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Untuk siswa di jenjang Sekolah Dasar (SD), misalnya, peserta didik menerima bantuan tahunan dengan jumlah tertentu. Untuk siswa di jenjang SMP dan SMA/SMK, jumlah bantuan yang diberikan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan akademik.

Tujuan utama dari KIP adalah :

1. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan biaya pendidikan.

3. Memberikan perlindungan sosial di bidang pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan miskin.
4. Mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

KIP berfungsi sebagai alat kebijakan publik untuk mengatasi disparitas pendidikan yang disebabkan oleh ekonomi. Program ini tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

## B. Teori Implementasi Kebijakan sebagai Kerangka Analisis

Dalam studi administrasi publik, implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting setelah perumusan kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), implementasi adalah proses di mana tujuan kebijakan dan aktivitas pelaksana kebijakan berinteraksi untuk menghasilkan output dan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Jadi, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif interaksi tersebut.

George C. Edwards III (1980) mengemukakan empat variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi → sejauh mana kebijakan dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun penerima manfaat.
2. Sumber daya → mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan sarana prasarana pendukung.
3. Disposisi → sikap, komitmen, dan kemauan dari para pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi → mekanisme organisasi, aturan, dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan jika keempat faktor ini bekerja sama dengan baik. Namun, jika salah satu faktor ini tidak optimal, implementasi akan menghadapi kesulitan.

Teori Edwards III terkait dengan pelaksanaan KIP di Lampung Tengah. Misalnya, ketika masyarakat tidak sepenuhnya memahami prosedur KIP, masalah komunikasi sering muncul. Sumber daya manusia yang terbatas di tingkat sekolah dan dinas pendidikan juga menyebabkan bantuan sering tertunda. Pelaksana kebijakan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat dari

sisi disposisi. Namun, struktur birokrasi kadang-kadang kaku, yang menghambat kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah di lapangan.

Dengan metodologi ini, penelitian KIP di Lampung Tengah tidak hanya berfokus pada elemen administratif tetapi juga pada cara pemangku kepentingan berinteraksi satu sama lain yang mempengaruhi kinerja kebijakan.

### C. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah memiliki populasi terbesar di Provinsi Lampung, dengan lebih dari 1,2 juta orang (BPS, 2023). Dengan mata pencaharian utamanya adalah pertanian, masyarakatnya beragam. Faktor utama yang mempengaruhi akses pendidikan adalah masalah ekonomi, karena tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah, terutama di daerah pedesaan.

Data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Lampung Tengah menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada SMP dan SMA masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Lampung. Misalnya, meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) SD hampir 100%, APM pada SMP hanya sekitar 78%, dan APM pada SMA hanya sekitar 65%. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan kesinambungan pendidikan, terutama saat anak-anak memasuki jenjang menengah.

Faktor lokasi juga berpengaruh. Sekolah tersebar tidak merata di seluruh wilayah Lampung Tengah. Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi tantangan tambahan karena akses ke sekolah di beberapa kecamatan membutuhkan perjalanan jauh. Diharapkan KIP dapat membantu anak-anak tetap bersekolah dalam situasi seperti ini.

Namun, laporan tahunan dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIP di Lampung Tengah menghadapi sejumlah masalah. Beberapa di antaranya adalah :

1. Masih ada siswa miskin yang tidak menerima KIP karena masalah pendataan.
2. Keterlambatan pencairan dana bantuan.
3. Kurangnya pemahaman orang tua tentang penggunaan dana KIP.
4. Terbatasnya mekanisme pengawasan pemanfaatan bantuan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

#### D. Tantangan Implementasi KIP di Lampung Tengah

Berdasarkan hasil pra-penelitian dan kajian literatur, terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi KIP di Lampung Tengah :

##### 1. Masalah Pendataan Penerima

Pendataan calon penerima KIP sering kali tidak akurat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan data antara Dinas Pendidikan dengan sekolah, serta keterbatasan koordinasi dengan lembaga lain seperti Dinas Sosial. Akibatnya, ada siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan KIP, sementara anak miskin justru terlewatkan.

##### 2. Distribusi dan Pencairan Dana

Proses pencairan dana KIP melalui bank sering menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan penyaluran, antrean panjang, dan kurangnya fasilitas pelayanan perbankan di daerah pedesaan. Situasi ini membuat penerima manfaat kesulitan mengakses bantuan.

##### 3. Pemanfaatan Dana

Tidak semua orang tua memahami bahwa dana KIP hanya boleh digunakan untuk keperluan pendidikan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain di luar sekolah. Hal ini menandakan perlunya sosialisasi yang lebih intensif.

##### 4. Sosialisasi Kebijakan

Informasi mengenai prosedur dan manfaat KIP tidak selalu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Di beberapa desa, orang tua siswa tidak mengetahui cara mengajukan atau memanfaatkan KIP, sehingga program tidak optimal.

##### 5. Pengawasan dan Akuntabilitas

Mekanisme pengawasan masih lemah, baik di tingkat sekolah maupun dinas pendidikan. Kurangnya transparansi dalam proses seleksi penerima menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, bahkan memunculkan potensi praktik tidak adil.

## E. Urgensi Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan KIP di Lampung Tengah memiliki urgensi yang signifikan, seperti yang ditunjukkan di atas. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran langsung tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KIP di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaannya.

Kedua, dari sudut pandang akademik, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan penelitian administrasi publik, khususnya dari sudut pandang implementasi kebijakan. Penelitian ini akan menyelidiki relevansi teori implementasi Edwards III dalam konteks wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi khusus.

Ketiga, dari perspektif sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran kebijakan pemerintah dalam mendukung akses ke pendidikan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi KIP dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi KIP di Lampung Tengah?
4. Sejauh mana KIP mampu meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Lampung Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program KIP di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi KIP di daerah tersebut.
3. Menganalisis peran pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan KIP.
4. Menilai dampak KIP terhadap akses dan keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu di Lampung Tengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### Manfaat Akademik

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan pendidikan di tingkat lokal.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait program bantuan pendidikan atau kebijakan sosial lainnya.
3. Menghasilkan kajian empiris yang dapat memperkuat literatur Ilmu Administrasi Negara, terutama dalam bidang implementasi kebijakan publik.

##### Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Lampung Tengah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan KIP.
2. Menjadi masukan bagi sekolah untuk memperkuat peran dalam pengawasan dan pendampingan siswa penerima KIP.
3. Memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan KIP sesuai tujuan program.
4. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat dalam memperbaiki desain kebijakan pendidikan berbasis bantuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D., & Winarno, B. (2021). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 9(2), 145–160.
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Prasetyo, R., & Kurniawan, A. (2020). Efektivitas penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah pertama. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 25–39.
- Sari, N. P., & Lestari, H. (2019). Evaluasi implementasi Kartu Indonesia Pintar di daerah pedesaan: Studi kasus Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 112–128.
- Subarsono, A. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.